Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 14313-14319

Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang

Grance Marsela Pandie[1], Jeny J. Therik[2], Catryn V. Adam[3], Dumanita Tamba[4]
[1,2,3,4]Universitas Nusa Cendana
Corresponding Author: Grance Marsela Pandie, E-Mail: grancepandie46@gmail.com
Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tetus di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian menggunakan model Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Evaluasi dilakukan menggunakan empat indikator menurut Dunn (1994), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes Tetus belum berjalan secara optimal. Dari sisi efektivitas, pengelolaan unit usaha belum sepenuhnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen usaha. Pada indikator efisiensi, pemanfaatan modal dan sumber daya belum dikelola secara maksimal sehingga perkembangan usaha berjalan lambat. Indikator kecukupan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang, khususnya pada unit usaha air bersih, masih terbatas sehingga pelayanan belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Responsivitas BUMDes juga masih rendah karena masih ditemui kurangnya koordinasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, BUMDes Tetus memerlukan peningkatan kapasitas pengelolaan, transparansi, komunikasi, serta dukungan sarana dan prasarana agar mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai motor penggerak perekonomian desa.

Kata Kunci: BUMDes, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; Evaluasi Program, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas.

ABSTRACT

Through the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Tetus in Kuanheun Village, Kupang Barat District, Kupang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, documentation, and literature studies. Data analysis uses the Miles & Huberman model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The evaluation is carried out based on four indicators proposed by Dunn (1994), namely effectiveness, efficiency, adequacy, and responsiveness. The results indicate that the implementation of the economic empowerment program through BUMDes Tetus has not run optimally. In terms of effectiveness, the management of business units has not fully succeeded in improving the community's economy due to limited human resource capacity in business management. Regarding efficiency, the utilization of capital and resources has not been maximized, resulting in slow business development. The adequacy indicator shows that supporting facilities and infrastructure—particularly for the clean water business unit—remain insufficient, leading to services that fail to fully meet community needs. Responsiveness is also considered low due to inadequate coordination, communication, and community involvement in planning and decision-making processes. Therefore, BUMDes Tetus requires improvements in management capacity, transparency, communication, and support for facilities and infrastructure to optimally fulfill its role as a driving force for the village economy.

Keywords: BUMDes, Community Economic Empowerment, Program Evaluation, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Responsiveness.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Pemerintah memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi ekonominya

melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola aset dan peluang usaha secara produktif demi meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Desa Kuanheun di Kecamatan Kupang Barat membentuk BUMDes Tetus sejak tahun 2017 dengan beberapa unit usaha, antara lain jasa sewa tenda, kursi, dan traktor; unit air bersih; serta simpan pinjam. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan akses layanan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan aktivitas usaha masyarakat. Namun, pelaksanaan BUMDes Tetus masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kapasitas manajerial pengelola yang terbatas, pemanfaatan modal yang belum optimal, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta minimnya koordinasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes telah berjalan dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program BUMDes Tetus menggunakan empat indikator Dunn (1994), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas, guna mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pengelolaan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang memiliki BUMDes yang aktif dalam program pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut telah melaksanakan berbagai program BUMDes yang beragam dan memiliki dampak yang signifikan terhadap Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan masyarakat terkait program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/gambaran yang objektif, faktual, akurat dan sistematis, mengenai masalah yang akan dikaji oleh peneliti.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Kuanheun, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, Masyarakat Desa Kuanheun. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat) dan data sekunder (dokumen pemerintah desa, kebijakan daerah, literatur).

Tabel 1 Informan

No	Kriteria Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Kuanheun	1

2	Ketua BUMDes	1
3	Sekretaris BUMDes	1
4	Bendahara BUMDes	1
5	Bendahara BUMDes	1
6	Tokoh Masyarakat	8
	Total	13

Analisis data akan menggunakan model interaktif empat tahap dari Miles dan Huberman, yaitu penyajian data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini dipilih karena memungkinkan proses analisis yang sistematis dan berulang sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan pola dan hubungan antar data. Untuk menjaga keabsahan data, teknik triangulasi sumber, metode, dan pengamat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Program BUMDes Tetus di Desa Kuanheun telah berjalan cukup baik karena telah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, khususnya melalui program jasa sewa traktor yang mendukung sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama warga serta penyediaan air bersih yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun memberikan manfaat nyata sejak 2017, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam penentuan tujuan program, rendahnya kesadaran membayar iuran, anggapan keliru bahwa BUMDes merupakan bantuan bukan badan usaha, keterbatasan SDM dalam administrasi dan pembukuan, serta kerusakan jaringan perpipaan air bersih yang sempat menyebabkan kekeringan dan kerugian bagi warga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipatif melalui musyawarah yang inklusif, peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen dan administrasi, serta perawatan rutin jaringan air bersih disertai penyediaan dana cadangan untuk perbaikan darurat agar keberlanjutan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.

Efisiensi

program BUMDes Tetus telah tepat sasaran karena mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penyediaan layanan air bersih yang kini telah menjangkau hampir seluruh warga sehingga kebutuhan dasar seperti memasak, mencuci, dan aktivitas harian dapat terpenuhi dengan mudah, serta melalui unit usaha jasa sewa traktor, jasa sewa tenda dan kursi, serta percetakan batako yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani sebagai mata pencaharian utama. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan seperti sebagian kecil masyarakat yang belum terlayani jaringan air bersih akibat pendataan yang belum menyeluruh, keterbatasan modal karena penyertaan hanya bersumber dari dana desa, serta minimnya jumlah traktor dan biaya perawatan sehingga pengembangan usaha belum optimal meskipun permintaan masyarakat terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan perlunya perluasan jangkauan layanan air bersih, peningkatan sosialisasi, serta strategi

alternatif dalam penguatan permodalan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pemanfaatan program pemerintah, maupun partisipasi masyarakat agar seluruh unit usaha dapat berkembang lebih berkelanjutan dan manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa.

Kecukupan

Fasilitas dasar untuk operasional BUMDes Tetus telah tersedia dan berfungsi cukup baik, namun masih ditemukan beberapa kendala signifikan, terutama belum adanya kantor tetap sehingga kegiatan administrasi dan rapat pengurus dilakukan secara sederhana dan kurang tertata. Selain itu akses jalan yang kurang memadai menghambat distribusi barang, serta ketiadaan fasilitas penunjang seperti toko atau gudang menyebabkan masyarakat harus membeli perlengkapan air bersih secara mandiri di luar desa. Temuan lain menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki antusiasme tinggi dalam menjalankan program, namun belum pernah memperoleh pelatihan khusus terkait manajemen usaha, pembukuan, maupun pelayanan, sehingga kapasitas pengelolaan masih terbatas dan rencana kerja sama pelatihan dengan lembaga pendidikan belum terealisasi. Oleh karena itu diperlukan pembangunan atau penyediaan kantor permanen, dukungan kendaraan operasional, pengembangan toko atau gudang perlengkapan air bersih sebagai unit usaha baru, serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM guna mendorong profesionalisme, keberlanjutan, dan optimalisasi pelayanan BUMDes.

Responsivitas

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa BUMDes Tetus pada dasarnya mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa program-program BUMDes, khususnya unit usaha jasa sewa tenda dan kursi, dinilai membantu kebutuhan masyarakat karena dapat diakses lebih mudah tanpa harus menyewa dari tempat yang jauh. Di sisi lain, BUMDes juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran**,** meskipun dalam praktiknya penyampaian masukan tersebut belum berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat cenderung memberikan kritik atau saran secara tidak langsung, misalnya kepada petugas lapangan yang mengecek meteran, sedangkan untuk menyampaikan langsung kepada pengurus inti seperti direktur BUMDes masih jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa BUMDes Tetus memiliki sistem koordinasi yang baik dengan adanya pertemuan rutin setiap akhir bulan. Pertemuan tersebut berfungsi untuk menyampaikan laporan administrasi secara transparan kepada masyarakat, melakukan evaluasi berkala, terutama terkait penggunaan penyertaan modal dan jalannya program, membangun komunikasi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat agar semua pihak mengetahui perkembangan serta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan forum pertemuan bulanan menjadi sarana koordinasi, evaluasi, dan transparansi yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Tetus.

KESIMPULAN

Dari segi efetivitas program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tetus telah mampu berjalan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa terutama melalui unit usaha jasa sewa, air bersih dan simpan pinjam. Usaha jasa sewa telah mendukung masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan sosial maupun pertanian, sedangkan unit air bersih membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Akan tetapi, manfaat yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas sehingga tujuan utama program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Dari segi Efisiensi program BUMDes Tetus telah mampu berjalan dan memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat desa, terutama melalui unit usaha jasa sewa, air bersih, dan simpan pinjam. Usaha jasa sewa telah mendukung masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan sosial maupun pertanian, sedangkan unit air bersih membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Akan tetapi, manfaat yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih relatif terbatas sehingga tujuan utama program pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Dari segi Kecakupan program BUMDes baru mampu menjawab sebagian kebutuhan masyarakat desa. Penyediaan air bersih dan jasa sewa sarana prasarana sosial telah membantu, tetapi sarana yang tersedia masih terbatas dan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kesiapan pelaksanaan program juga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana penunjang, dan kurangnya pelatihan bagi pengelola. Oleh karena itu, kecukupan program dalam menjawab permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Dari segi Responsivitas masyarakat menunjukkan respons yang cukup positif terhadap keberadaan BUMDes. Program yang dijalankan dianggap bermanfaat dan diharapkan dapat terus berkembang. Akan tetapi, responsivitas pengelola dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya hambatan pada unit simpan pinjam yang sempat terhenti akibat masalah pengembalian dana. Dengan demikian, meskipun BUMDes telah mendapat dukungan masyarakat, pengelola masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan serta keluhan masyarakat agar tercipta sinergi yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola BUMDes, pemerintah desa, maupun pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan BUMDes di Desa Kuanheun:

Pengurus BUMDes perlu meningkatkan kapasitas manajemen dan kemampuan pengelolaan usaha melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan tersebut dapat mencakup aspek manajemen organisasi, kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Dengan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, pengurus diharapkan mampu mengelola unit usaha secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

BUMDes sebaiknya lebih fokus mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal desa, seperti pertanian, peternakan, atau pengolahan hasil bumi. Potensi lokal yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat serta membuka lapangan kerja baru. Diversifikasi usaha yang terlalu jauh dari potensi desa sebaiknya dihindari agar BUMDes tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pemasaran produk.

Masyarakat desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan BUMDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pelibatan masyarakat yang lebih luas akan menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap BUMDes sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga turut mendukung dan menjaga keberlangsungan usaha yang dijalankan.
Pemerintah desa maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam bentuk dukungan kebijakan, bantuan modal, serta pendampingan teknis. Kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, maupun mitra swasta, juga perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan modal usaha, manajemen kelembagaan, dan inovasi program. Sinergi antara BUMDes, masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga akan memperkuat posisi BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

Perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap setiap program BUMDes. Evaluasi yang dilakukan secara teratur akan membantu menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, program BUMDes dapat terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., & Mardiana, A. (2021). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *2*(2), 149–158.

Ari S, A. S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Bahar,A.A.,Marijan, K.,&Mardiyanta,A. (2025). Kebijakan Publik Dan Kekuasaan Di Indonesia. Bumi Aksara.

Fatmawati, I. (2022). Evaluasi Kurikulum Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Di MAN 1 Kota Kediri Dengan *Countenance Model Stake*. IAIN Kediri.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi,P.M.,Asroni, A., Yunesman, Y.,&Merjani,A.(2025). Metode Penelitian Kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ilya, S. (2025).Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Deskriptif Di Bumdes Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kairupan, S. B., & Mowilos, R. (2025). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Penerbit Tahta Media.

Nursella, S., Silvia, S. A., & Khairul, U. K. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Kasus Bumdes DKI JAYA Desa Duku Ilor, Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu). Institut Agama Islam Negeri Curup.

R, S. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wisata Lerep. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 88–101.

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. *Umsida Press*, 1–237.

Saputra, R. A., Azhari, A. F., & Enggarani, N. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(8).

Sos, J. P. S. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Unisri Press*.

Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.

Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*, *288*.

Sugiyono, D. (2010). Memahami penelitian kualitatif.

SUTANTO, T. (2022). Evaluasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Uin Raden Intan Lampung.

Tilmizani, A. (2025). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kola Kola, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

WAHID, N. U. R. A. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan (*Studi Kasus Di Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu*). Fakultas Syariah.

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, *3*, 25–32.

Zailani, A. S. (2018). Impementasi Metode Pembelajaran Problem Based Intruction Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Di Man Nganjuk Skripsi Oleh. *Surabaya:* UIN Sunan Ampel.